

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis – Satuan Kerja Perangkat Daerah ini merupakan proses yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya potensi yang ada, dan mengorganisasikan secara sistematis. Penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja bagi Instansi Pemerintah dan merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dengan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat dan perkembangan jaman dalam rangka menyongsong masa depan yang lebih baik.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka Instansi Pemerintah harus terus-menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Manfaat Rencana Strategis adalah : 1) untuk merencanakan suatu kegiatan dalam menghadapi tuntutan kebutuhan dan kepentingan dari semua stakeholder; 2) untuk pengelolaan keberhasilan tindakan; 3) berorientasi kepada masa depan atau berkelanjutan ; 4) fleksibel (menyesuaikan dengan potensi dan peluang yang ada).

Dengan demikian untuk memperoleh hasil fisik yang optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan perencanaan yang matang baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang sebagai pedoman dan arah pelaksanaan pembangunan.

BP2KP merupakan unit perangkat daerah di Kabupaten Cilacap yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Cilacap, mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan kewenangan di bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta Ketahanan Pangan di wilayah Kabupaten Cilacap.

BP2KP Kabupaten Cilacap, sesuai kewenangan dan fungsinya diharapkan mampu menyelenggarakan Identifikasi, pembinaan dan penanganan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta Ketahanan Pangan.

Dalam Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kabupaten Cilacap, dilaksanakan secara terencana, terpadu, rasional, optimal dan bertanggung jawab dengan memanfaatkan potensi yang ada melalui pembinaan sumber daya manusia pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan dalam rangka mewujudkan Ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis secara berkesinambungan.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis – Satuan Perangkat Daerah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap Tahun 2012 - 2017 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang – undang Nomor 16 tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
5. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Cilacap.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 – 2017.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan adalah untuk menjabarkan Visi, Misi, Program dan Kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan (2012-2017).

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Renstra Badan Pelaksanaan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap tahun 2012 – 2017 adalah untuk memberikan arah kebijakan perencanaan pembangunan serta prioritas pembangunan sektor Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta Ketahanan Pangan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, serta sebagai acuan berbagai pihak dalam menetapkan kebijakan pembangunan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta Ketahanan Pangan pada lima tahun ke depan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

#### **Bab. I PENDAHULUAN**

##### **1.1. Latar Belakang**

Sub bab ini menjelaskan mengenai latar belakang disusunnya Renstra 2012 – 2017 dan menjelaskan mengenai pengertian Renstra.

##### **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Sub bab ini berisi landasan hukum penyusunan Renstra Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan tahun 2012 – 2017 mulai perundang – undangan yang paling tinggi sampai dengan terendah, yang mengamanatkan untuk menyusun Renstra ini.

##### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Sub bab ini menjelaskan maksud dan tujuan disusunnya Renstra tahun 2012 – 2017.

##### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sub bab ini menjelaskan sistematika penulisan / pokok – pokok bahasan dalam dokumen Renstra Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap tahun 2012 – 2017.

## Bab. II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

### 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Sub bab ini menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD serta uraian tugas dan fungsi.

### 2.2. Sumber Daya SKPD

Sub bab ini menjelaskan tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya termasuk sumber daya manusia dan aset.

### 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Sub bab ini menjelaskan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran / target renstra SKPD periode sebelumnya.

### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

Sub bab ini menjelaskan tentang hasil analisis terhadap Renstra Kabupaten.

## Bab. III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.

Sub bab ini menjelaskan permasalahan – permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor – faktor yang mempengaruhi.

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Sub bab ini menjelaskan tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

### 3.3. Telaahaan Renstra Kementrian / Lembaga dan Renstra SKPD.

Sub bab ini menjelaskan faktor – faktor penghambat ataupun faktor – faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi pelayanan SKPD.

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Sub bab ini menjelaskan faktor – faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi

permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

### 3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis.

Sub bab ini menjelaskan tentang informasi isu strategis yang akan ditangani melalui renstra SKPD tahun rencana.

## Bab. IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN.

### 4.1. Visi dan Misi SKPD

Sub bab ini menjelaskan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD.

### 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Sub bab ini menjelaskan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah.

### 4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

Sub bab ini menjelaskan strategi dan kebijakan SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang.

## Bab. V RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN INDIKATIF

Sub bab ini menjelaskan rencana program prioritas dengan kebutuhan pendanaan indikatif.

## Bab. VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RJPMD

Sub bab ini menjelaskan indikator kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RJPMD.

## Bab. VII PENUTUP

Sub bab ini menjelaskan harapan dengan tersusunya Rencana Strategis

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN SKPD

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Cilacap, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis bidang penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan;
2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan ketahanan pangan;
4. penyusunan program penyuluhan Kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional;
5. pelaksanaan penyuluhan;
6. Satuan Administrasi pangkal (Satmingkal) Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas pada tingkat Kabupaten;
7. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penyuluhan;
8. pengembangan, mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
9. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
10. pelaksanaan pembinaan pengembangan kerjasama serta kemitraan penyuluhan;
11. pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana;
12. pengelolaan pembiayaan penyuluhan;
13. penumbuhkembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;

14. pelaksanaan fasilitasi forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
15. pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS); swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan
16. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kondisi tugas di Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap dikepalai oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) yang membawahi 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) bidang, yaitu :

a). Sekretariat

Sekretariat pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan program, koordinasi tugas – tugas bidang, pengelolaan administrasi keuangan, tata usaha dan kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat, keprotokolan dan kepegawaian serta koordinasi tugas-tugas balai penyuluhan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi, antara lain :

- 1). Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
- 2). Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
- 3). Pengelolaan penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi program Badan Pelaksana penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
- 4). Pelaksanaan koordinasi tugas-tugas bidang dan balai penyuluhan;
- 5). Pengelolaan urusan administrasi keuangan;
- 6). Pengelolaan tata usaha, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, hubungan masyarakat, keprotokolan dan kepegawaian Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
- 7). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan kegiatan pada Sekretariat yang utama adalah membantu Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dan Kegiatan

yang mendukung pelayanan administrasi sesuai dengan kewenangan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) adalah :

- 1). Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kantor, dengan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan makanan dan minuman, dan penyediaan biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi untuk mendukung pelaksanaan pelayanan dan kelancaran administrasi kepegawaian di Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
  - 2). Pelaksanaan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal serta penilaian angka kredit penyuluh.
  - 3). Pelaksanaan peningkatan disiplin aparatur, dengan kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
  - 4). Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor dan pemeliharaan rutin/berkala.
  - 5). Pelaksanaan koordinasi dengan bidang dan antar SKPD untuk peningkatan pelaksanaan pembangunan daerah.
- b). Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan

Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi program penyuluhan dan pengembangan metode penyuluhan serta pengembangan materi penyuluhan dan kemitraan usaha.

Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan adalah merencanakan Pembangunan bidang penyelenggaraan penyuluhan yang meliputi antara lain :

- 1) Program penyuluhan dan pengembangan metode penyuluhan.
  - 2) Pengembangan Materi Penyuluhan dan Kemitraan Usaha
- c). Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi, pengembangan teknis

kelembagaan penyuluh, kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha, sumber daya manusia dan meningkatkan kompetensi penyuluh baik penyuluh PNS, Penyuluh Swasta dan Penyuluh Swadaya, pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.

Kegiatan Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah merencanakan Pembangunan bidang kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia yang meliputi antara lain :

- 1) Pengembangan kelembagaan penyuluhan, kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha.
- 2) Meningkatkan kompetensi penyuluh baik penyuluh PNS, penyuluh swasta dan penyuluh swadaya, pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.

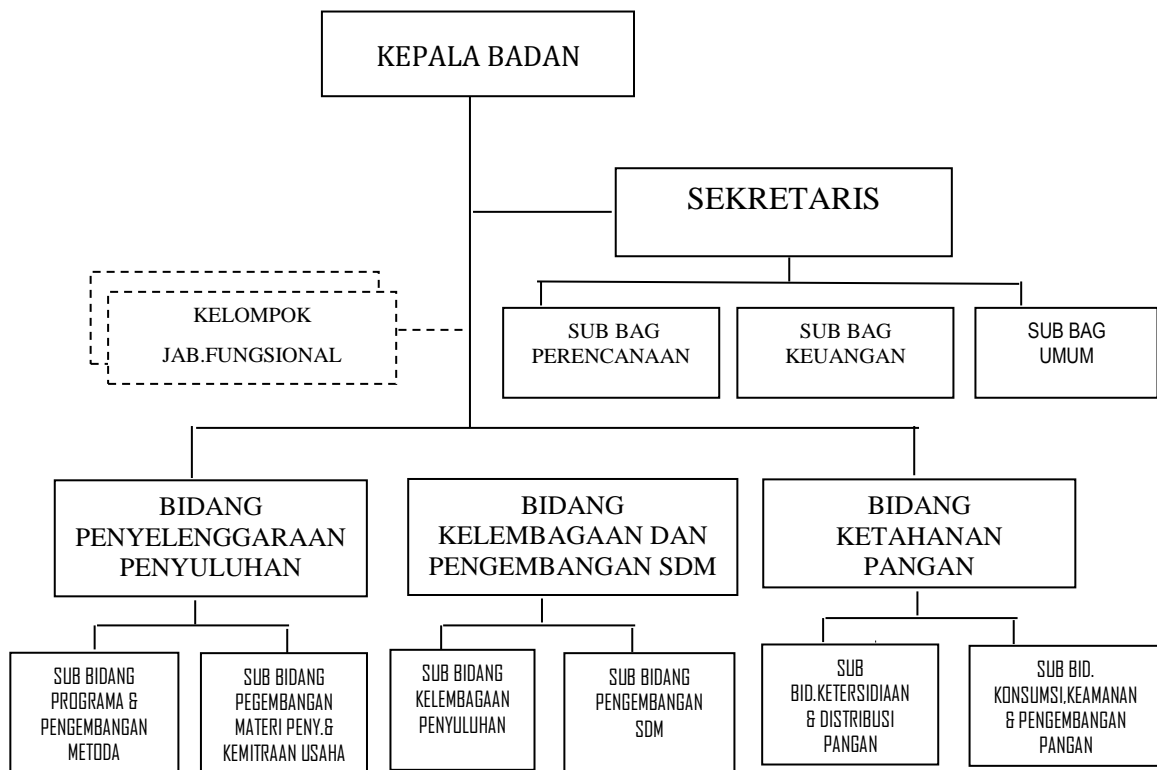
d). Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, bimbingan dan pengendalian teknis dan pengelolaan administrasi bidang ketahanan pangan.

Kegiatan bidang ketahanan pangan adalah merencanakan Pembangunan bidang ketahanan pangan yang meliputi antara lain :

- 1) Ketersediaan dan Cadangan Pangan
- 2) Distribusi dan Akses Pangan
- 3) Penganekaragaman dan Keamanan Pangan
- 4) Penanganan Kerawanan Pangan

## Struktur Organisasi



Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap terdiri dari :

- a. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
- b. Sekretaris membawahi :
  - 5) Sub Bagian Perencanaan
  - 6) Sub Bagian Keuangan
  - 7) Sub Bagian Umum
- b. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, membawahi :
  - Sub Bidang Program dan Pengembangan Metoda
  - Sub Bidang Pengembangan Materi Penyuluhan dan Kemitraan Usaha
- c. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan SDM, membawahi :
  - Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan
  - Sub Bidang Pengembangan SDM
- d. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi :
  - Sub Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
  - Sub Bidang Konsumsi, Keamanan dan Pengembangan Pangan

## 2.1. Sumber Daya SKPD

### 2.1.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah personil yang ada di Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan pangan keadaan bulan Desember 2012, adalah 269 orang yang dapat dirinci sebagai berikut :

a. Menurut Jabatannya

- Eselon II.b	: 1 Orang
- Eselon III.a	: 1 Orang
- Eselon III.b	: 3 Orang
- Eselon IV.a	: 9 Orang
- Fungsional Penyuluh	: 146 Orang
- Pelaksana Tugas (Staf)	: 17 Orang
- THL-TBPP	: 95 Orang
<hr/>	
Jumlah	: 269 Orang

b. Menurut Tingkat Pendidikannya

- Strata 2 / Magister	: 8 Orang
- Strata 1 / Sarjana	: 132 Orang
- Diploma IV	: 18 Orang
- Diploma III/ Sarmud	: 52 Orang
- SLTA	: 58 Orang
- SLTP	: 0 Orang
- SD	: 1 Orang
<hr/>	
Jumlah	: 269 Orang

c. Menurut Status PNS

- Pegawai Negeri Sipil	: 171 Orang
- Harian Lokal	: 3 Orang
- Lain-lain	: 95 Orang
<hr/>	
Jumlah	: 269 Orang

d. Menurut Kepangkatan

- Golongan IV/c	: 0 Orang
- Golongan IV/b	: 6 Orang
- Golongan IV/a	: 21 Orang

- Golongan III/d	: 48 Orang
- Golongan III/c	: 38 Orang
- Golongan III/b	: 20 Orang
- Golongan III/a	: 18 Orang
- Golongan II/d	: 4 Orang
- Golongan II/c	: 8 Orang
- Golongan II/b	: 6 Orang
- Golongan II/a	: 2 Orang
- Golongan I/d	: 0 Orang
- Golongan I/a	: 0 Orang
- Non Golongan	: 98 Orang
Jumlah	: 269 Orang

### 2.1.2. Aset

Aset yang dimiliki Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan keadaan bulan Desember 2012 ini untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari antara lain :

Tabel 1. Kondisi Sarana Kerja BP2KP Kabupaten Cilacap

No	JENIS / NAMA BARANG	JUMLAH	KEADAAN
1.	Meja Eselon II	1 Buah	Baik
2	Kursi Eselon II	1 Buah	Baik
3.	Meja Eselon III	4 Buah	Baik
4.	Kursi Eselon III	4 Buah	Baik
5.	Meja Eselon IV	12 Buah	Baik
6.	Kursi Eselon IV	12 Buah	Baik
7.	Almari	30 Buah	Baik
8.	PC Unit	13 Unit	Baik
9.	UPS	9 Unit	Baik
10.	Printer	10 Unit	Baik
11.	Meja Komputer	6 Buah	Baik
12.	Filling Cabinet	20 Buah	Baik
13.	Kursi Lipat	94 Buah	Baik
14.	Meja Kursi Tamu	4 Buah	Baik
15.	AC	9 Unit	Baik
16.	Meja	60 Buah	Baik
17.	Kursi Kerja / Rapat	140 Buah	Baik
18.	Brankas	3 Buah	Baik
19.	Rak Besi	3 Buah	Baik

20.	Meja Rapat	6 Buah	Baik
21.	Mesin Potong Rumput	5 Unit	Baik
22.	Penghancur Kertas	1 Unit	Baik
23.	LCD	8 Unit	Baik
24.	Facum Cleaner	1 Unit	Baik
25.	Note Book	10 Unit	Baik
26.	Scaner	2 Unit	Baik
27.	Wireless	2 Unit	Baik
28.	Kamera Digital	3 Unit	Baik
29.	Lemari Es	2 Unit	Baik
30.	Handy Came	3 unit	Baik
31.	Layar LCD	4 Buah	Baik
32.	Televisi	2 Buah	Baik
33.	Radio Tape	5 Unit	Baik
34.	Kompas Gas	2 buah	Baik
35.	Tabung Gas	2 Buah	Baik
36.	Pemadam Api	2 Buah	Baik
37.	Dispenser	1 Buah	Baik
38.	Speaker Aktif	2 Unit	Baik
39.	Pompa Air	1 Unit	Baik
40.	Sreen House	1 Unit	Baik
41.	Tanaman Anggrek	525 Pot	Baik
42.	Sepeda Motor	19 Unit	Baik
43.	Mobil	4 Unit	Baik

### 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Tahun 2009 s/d 2012 tercermin dalam pencapaian sasaran – sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2009 s/d 2012 adalah sebagai berikut :

#### 2.3.1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)

Capaian indikator kinerja peningkatan ketahanan pangan tahun 2012 telah melampaui capaian target yang ditetapkan pada akhir pelaksanaan renstra tahun 2009 s/d 2012, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1 : Data Target dan Capaian Kinerja Peningkatan Ketahanan Pangan Tahun 2012.

No.	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	94	94
2	Penguatan Cadangan Pangan	87	87
3	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	85	85
4	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	90	90
5	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	84	86,2
6	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80	83
7	Penanganan Daerah Rawan Pangan	85	86

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa target kinerja program ketahanan pangan yang ditetapkan dalam renstra tahun 2009 s/d 2012 dapat tercapai bahkan beberapa indikator seperti Skor Pola Pangan Harapan (PPH), Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan, dan Penanganan Daerah Rawan Pangan dapat melebihi target, dengan dukungan kegiatan sebagai berikut :

- a) Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan dengan anggaran sebesar Rp. 315.000.000,- dengan realisasi anggaran sampai Desember 2012 sebesar Rp. 314.742.000,- (99,9 %) untuk pertemuan dalam rangka pemantauan ketersediaan pangan, Rakor Dewan Ketahanan Pangan, pertemuan pemantauan ketersediaan dan distribusi pangan dalam rangka Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan penyusunan peta rawan pangan serta pengadaan 1 buah note book.
- b) Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan dengan anggaran sebesar Rp. 132.000.000,- dengan realisasi anggaran sampai dengan Desember 2012 sebesar Rp. 131.945.000,- (99,9%) untuk

pertemuan Tim Desa Mandiri Pangan dan Pelatihan Desa Mandiri Pangan.

- c) Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Tanaman dengan anggaran sebesar Rp. 340.000.000,- dengan realisasi anggaran samapi Desember 2012 sebesar Rp. 339.500.000,- (99,8%) untuk lomba cipta menu berbasis sumberdaya wilayah yang diikuti oleh 24 kecamatan, pelatihan pangan olahan berbasis sumberdaya lokal, workshop gerakan pangan olahan berbasis sumberdaya lokal, penyusunan leaflet, penyusunan data base potensi dan keanekaragaman pangan lokal serta sosialisasi gerakan percepatan penganekaragaman/diversifikasi pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan.
- d) Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Tanaman bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dengan anggaran sebesar Rp. 293.445.400,- realisasi anggaran sebesar Rp. 284.894.000,- (97,1%) untuk pelatihan pangan olahan berbasis sumberdaya lokal, bantuan peralatan dan bibit.
- e) Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 135.000.000,- realisasi anggaran sampai dengan Desember 2012 sebesar Rp. 134.812.500,- (99,8 %) untuk pelatihan lumbung pangan.
- f) Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan dengan anggaran sebesar Rp. 343.600.000,- realisasi anggaran sampai dengan Desember 2012 sebesar Rp. 343.600.000,- (100,0%) untuk kegiatan sosialisasi mutu dan keamanan pangan, pembinaan warung sekolah / kantin dan pemantauan mutu dan keamanan pangan.
- g) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- realisasi anggaran sampai dengan Desember 2012 sebesar Rp. 29.090.000,- (96,9%) untuk monitoring, evaluasi dan pelaporan ketahanan pangan.

### 2.3.2. Peningkatan Kesejahteraan Petani

Capaian Indikator Program peningkatan kesejahteraan petani yaitu Nilai Tukar Petani (NTP) pada tahun 2012 mencapai 106,62 % atau meningkat 0,48% dari tahun 2011, dengan dukungan kegiatan sebagai berikut :

- a) Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis dengan anggaran sebesar Rp 275.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 275.000.000,- (100%) untuk pelatihan manajemen dan administrasi kelompok tani di 4 (empat) UPT yang masing-masing diikuti 30 orang, pelatihan budidaya tanaman hortikultura di 4 UPT BP dengan jumlah peserta sebanyak 120 orang ( 30 orang / UPT ) terdiri dari petani, pelaku utama, dan pelaku usaha, anggota, pelatihan budidaya tanaman hortikultura di 4 UPT BP dengan jumlah peserta sebanyak 120 orang ( 30 orang / UPT ) terdiri dari petani, pelaku utama, dan pelaku usaha, anggota pertemuan apresiasi pengelolaan PUAP bagi Kades, PPL Pendamping selama 1 (satu) hari di 6 (enam) lokasi dengan jumlah peserta 237 orang dan bimbingan teknis manajemen pengelolaan PUAP bagi pengurus Gapoktan PUAP selama 2 hari di 8 ( delapan ) lokasi dengan jumlah peserta 237 orang.
- b) Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis dengan anggaran sebesar Rp Rp 310.000.000,- dengan realisasi sampai Desember 2012 sebesar Rp. 309.425.590,- (99,8 %) untuk temu usaha 6 kelompok pelaku usaha yaitu temu usaha perikanan, temu usaha pengolahan hasil perikanan, temu usaha petani hortikultura, temu usaha peternak unggas, temu usaha pengolahan hasil perkebunan, temu usaha hasil pertanian masing-masing sebanyak 2 (dua) kali, kegiatan pelatihan manajemen agribisnis pelaku utama dan pelaku usaha (bidang Pertanian) di 4 (empat) lokasi dengan jumlah peserta 120 orang, pelatihan pemuda tani bidang pertanian, peternakan dan perikanan di 4 (empat) lokasi dengan jumlah peserta 120 orang, pelatihan anggota kelompok wanita tani intensifikasi pekarangan di 4 (empat) lokasi dengan jumlah peserta 120 orang.

- c) Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani dengan anggaran sebesar Rp 135.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 133.735.000,- (99,1%) untuk penyusunan profil kelembagaan kelompok tani, pembentukan Komisi Penyuluhan Tingkat Kabupaten, pelaksanaan mimbar saresehan tingkat kabupaten dengan jumlah peserta 50 orang, temu usaha agribisnis dengan jumlah peserta 50 orang, rapat koordinasi KP3K sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah peserta 120 orang, rapat koordinasi KTNA sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah peserta 120 orang dan evaluasi gapoktan di 24 kecamatan sejumlah 279 Gapoktan serta revitalisasi kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 650.000,- yang berasal dari penghematan honorarium panitia pelaksana kegiatan sebesar Rp. 150.000,- dan belanja sewa ruangan rapat / pertemuan sebesar Rp. 500.000,-.
- d) Kegiatan Evaluasi Kelompok Petani / Nelayan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 125.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 124.990.000,- (99,99%) untuk pembinaan dan penilaian klas kelompok tani sebanyak 1.974 kelompok tani dengan rincian :
1. Klas Kelompok Tani Pemula = 570 Kel
  2. Klas Kelompok Tani Lanjut = 1.137 Kel
  3. Klas Kelompok Tani Madya = 257 Kel
  4. Klas kelompok Tani Utama.. = 10 Kel

### 2.3.3. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunanngan

Capaian indikator peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan ditunjukkan dengan jumlah teknologi yang sudah diterapkan petani pada tahun 2012 mencapai lebih dari 10 teknologi yaitu teknologi PTT Padi, Jagung dan Kedelai, SRI, Sistem Legowo, Inseminasi buatan, Pengolahan Pakan Ternak, Intensifikasi Ayam Buras, Teknologi Konservasi Tanah dan Air serta Teknologi Prebiotik, dengan dukungan kegiatan sebagai berikut :

- a) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 98.495.000,- (98,49 %) untuk pembangunan screen house tanaman hias 1 unit, pembelian tanaman hias/anggrek dan kursus budidaya tanaman hias/anggrek sebanyak 20 orang.
- b) Kegiatan Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam dengan anggaran sebesar Rp 1.631.963.000,- yang realisasi anggaran sampai dengan Desember 2012 sebesar Rp. 1.630.517.600,- (99,9%) untuk kegiatan BinteK pengembangan teknologi berbasis tanaman pangan, BinteK pengembangan teknologi berbasis tanaman hortikultura, BinteK pengembangan teknologi berbasis tanaman perkebunan, binteK pengembangan teknologi berbasis peternakan, binteK pengembangan teknologi berbasis perikanan budidaya, binteK diversifikasi pangan, binteK organik bagi petani, pelatihan manajemen agribisnis, pertemuan rapat APTI Cabang Cilacap dan pembentukan PAC APTI cabang Cilacap, pertemuan petani, pelatihan TOT organik dan studi banding / magang. penyuluh / petani.
- c) Pengadaan Sarana dan prasarana Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- realisasi sampai dengan Desember 2012 sebesar Rp. 99.709.188,- (99,7%) untuk Pelatihan Budidaya Padi Hibrida sebanyak 4 kali dengan peserta masing - masing 25 orang Demplot budidaya padi hibrida 4 lokasi.
- d) Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- realisasi sampai dengan Desember 2012 sebesar Rp. 97.047.300,- (97,0%) untuk Bimtek pembuatan media penyuluhan 1 kali 30 orang Penyusunan buku Warung Informasi Teknologi (Warintek) 280 buku Penyusunan buku pegangan penyuluhan 280 buku Penyusunan buletin media penyuluhan 280 buku Bantuan alat peraga penyuluhan berupa LCD Proyektor Siaran Radio Penyuluhan 48 kali siaran.

- e) Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna dengan anggaran sebesar Rp. 125.000.000,- dengan realisasi anggaran sampai Desember 2012 sebesar Rp. 122.986.346,- (98,3%) untuk Pertemuan teknis penyuluh 5 kali selama 2 harii masing - masing 40 orang

#### 2.3.4. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

- a) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan dengan anggaran sebesar Rp Rp 465.000.000,- realisasi anggggaran sebesar Rp. 464.922.300,- (99,9%) rembug Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), untuk kegiatan training penyuluh.
- b) Pendampingan Bagi Pertanian/ Perkebunan dengan anggaran sebesar Rp 710.000.000,- realisasi anggaran sampai dengan Desember 2012 sebesar Rp. 709.920.847,- (99,9%) untuk penyusunan programa penyuluhan tingkat kecamatan di 24 kecamatan dan programa kabupaten.
- c) Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Pembudidayaan Ikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 19.200.000,- untuk pelatihan manajemen usaha kelompok pembudidayaan ikan di 4 (empat) UPT BP dengan jumlah peserta 100 orang, dengan persentase pencapaian 96,0 %.

#### 2.3.5. Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 28.467.000,- untuk kegiatan rapar monev sebanyak 3 kali, kegiatan monev penyelenggaraan penyuluhan sebanyak 21 Kali dengan prosentase pencapaian sebesar 94,6%.

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Salah satu proses dalam manejemen strategik adalah menilai lingkungan organisasi melalui proses pencermatan lingkungan organisasi. Yang dimaksud pencermatan disini adalah kondisi, situasi, keadaan peristiwa dan pengaruh-pengaruh di dalam dan di luar sekeliling organisasi yang berdampak pada

kehidupan organisasi, berupa kekuatan internal, kelemahan internal, peluang eksternal dan tantangan eksternal. Secara tekstual hal-hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factors*) merupakan faktor yang sangat penting dalam penempatan pencapaian keberhasilan organisasi. Faktor keberhasilan ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisa faktor lingkungan baik internal maupun eksternal dengan pendekatan SWOT, analisis dilanjutkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensi serta skala prioritasnya.

Faktor-faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Dari analisa SWOT, faktor-faktor eksternal dan Internal Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Kabupaten Cilacap dirumuskan sebagai berikut ;

**TABEL 1. FAKTOR-FAKTOR INTERNAL**

<b>KEKUATAN</b>	<b>KELEMAHAN</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Struktur organisasi dan eksistensi kelembagaan BP2KP sudah cukup memadai.</li> <li>▪ Penyebaran dan jumlah SDM (Penyuluh) yang ada cukup memadai.</li> <li>▪ Adanya komitmen yang tinggi dari Pimpinan dan Personil BP2KP.</li> <li>▪ Adanya regulasi dan kewenangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kapasitas SDM/ Penyuluh belum merata.</li> <li>▪ Terbatasnya anggaran dan sarpras.</li> <li>▪ Kurangnya koordinasi antar instansi lingkup pertanian.</li> <li>▪ Terbatasnya kewenangan.</li> </ul>

**TABEL 2. FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL**

<b>PELUANG</b>	<b>ANCAMAN</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Potensi alam sektor pertanian, perikanan dan kehutanan di Kab. Cilacap.</li> <li>▪ Dukungan pemerintah pada kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan.</li> <li>▪ Pertumbuhan ekonomi dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masuknya produk pertanian luar negeri secara bebas (dampak era pasar bebas).</li> <li>▪ Tuntutan masyarakat akan layanan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.</li> <li>▪ Kapasitas SDM Petani/Nelayan (Pelaku Utama dan Pelaku Usaha)</li> </ul>

kemajuan teknologi pertanian.	<p>yang terbatas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adanya kegiatan penyuluhan oleh swasta dan masyarakat dengan fasilitas pendukung yang lebih memadai.</li> </ul>
-------------------------------	--

Melalui pemetaan interaksi antar faktor baik eksternal maupun internal, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan merumuskan faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas SDM/Penyuluh untuk meningkatkan Kapasitas SDM Petani/ Nelayan (Pelaku Utama dan Pelaku Usaha) yang terbatas.
2. Penyebaran dan jumlah SDM (Penyuluh) yang cukup memadai untuk meningkatkan kapasitas SDM Petani/ Nelayan (Pelaku Utama dan Pelaku Usaha) yang terbatas.
3. Optimalisasi anggaran dan sarpras yang terbatas untuk meningkatkan kapasitas SDM Petani/Nelayan (Pelaku Utama dan Pelaku Usaha) yang terbatas.
4. Struktur organisasi dan eksistensi kelembagaan BP2KP yang memadai untuk meningkatkan kapasitas SDM Petani/Nelayan (Pelaku Utama dan Pelaku Usaha) yang terbatas serta terwujudnya ketahanan pangan masyarakat, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik kualitas maupun kuantitas, aman, merata dan terjangkau dengan mendorong keanekaragaman pola konsumsi melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan potensi keanekaragaman yang berbasis pada sumberdaya lokal.

### BAB III

## ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan telah dilakukan identifikasi permasalahan yang ada di Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata dan terjangkau.
- b. Masih rendahnya tingkat pendapatan / kesejahteraan petani.
- c. Belum optimalnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan.
- d. Pengetahuan, kemampuan dan kompetensi para penyuluh masih terbatas.
- e. Kurangnya sarana dan prasarana penyuluhan / Balai Penyuluhan.

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Cilacap terpilih tahun 2012 – 2017 adalah “Bekerja dan Berkarya Menuju Cilacap Sejahtera”; digunakan sebagai dasar visi Kabupaten Cilacap yaitu : “ **Menjadi Kabupaten Cilacap yang Sejahtera Secara Merata** “, kemudian dijabarkan dalam enam misi sebagai berikut :

- a. Mengembangkan sumber daya manusia berkualitas dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Mewujudkan demokratisasi dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat entrepreneur, profesional, dan dinamis mengedepankan prinsip Good Governance dan Clean Government.
- c. Meningkatkan dan memperbaiki layanan pendidikan dan pelatihan, meningkatkan derajat kesehatan individu dan masyarakat.
- d. Mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal dan regional melalui sinergi fungsi – fungsi pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, perdagangan, industri dan dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja.

- e. Memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah, terutama usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta koperasi, membangun dan mengembangkan pasar bagi produk lokal.
- f. Memeratakan dan menyeimbangkan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, efektif dan efisien.

Memperhatikan visi, misi serta program kepala daerah terpilih periode 2012 – 2017 maka tugas dan fungsi serta kedudukan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan selaku unsur pendukung Kepala Daerah di bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta Ketahanan Pangan, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan diharapkan dapat mengakselerasi kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya petani – nelayan di pedesaan dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut serta mensukseskan kebijakan “Bangga Mbangun Desa “.

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan tahun 2012 – 2017 tidak terlepas dari tugas pokok dan fungsi yang diarahkan untuk mencapai sasaran Misi keempat “ Mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal dan regional melalui sinergi fungsi – fungsi pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, perdagangan, industri dan dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja dan Misi kelima “ Memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah, terutama usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta koperasi, membangun dan mengembangkan pasar bagi produk lokal ”.

### 3.3. Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga dan Renstra SKPD.

Rancanagn Rencana Strategis (Renstra) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Tahun 2012 – 2017 disusun untuk mendukung terwujudnya 4 (empat) sukses pembangunan pertanian dari Kementerian Pertanian, yaitu :

- a. Pencapaian swasembada beras, jagung, kedelai, gula dan daging.
- b. Peningkatan diversifikasi pangan.
- c. Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor.
- d. Peningkatan kesejahteraan petani.

Sedangkan disektor kelautan dan perikanan untuk mendukung pengembangan kawasan minapolitan, dan di sektor kehutanan fokus kegiatan ditujukan kepada upaya rehabilitasi hutan dan lahan serta pengembangan potensi perkebunan.

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 yang telah ditetapkan menjadi Perda nomor 9 tahun 2011 telah ditetapkan rencana kawasan budidaya yaitu kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian dan kawasan peruntukan perikanan, untuk meningkatkan produksi hasil pertanian, perikanan dan perkebunan. Kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 65.050 (enam puluh lima ribu lima puluh) hektar meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, dan kawasan hortikultura berada di setiap kecamatan, untuk dapat dipertahankan dan tidak terjadi alih fungsi lahan.

Terkait dengan isu lingkungan, isu lingkungan yang paling utama adalah terjadinya degradasi lahan karena penggunaan pupuk dan pestisida kimia, untuk mengatasi hal tersebut dilakukan upaya pemanfaatan pupuk dan pestisida organik kepada para petani.

### 3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis.

Berdasarkan metode dan indikator penetapan isu-isu strategis, maka isu-isu strategis yang diangkat Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata dan terjangkau.
2. Peningkatan tingkat pendapatan / kesejahteraan petani.
3. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan.
4. Peningkatan Pengetahuan, kemampuan dan kompetensi para penyuluh masih terbatas.
5. Peningkatan sarana dan prasarana penyuluhan / Balai Penyuluhan.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan

Pangan diharapkan lebih responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan yang ada.

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Rencana Strategis ( Renstra ) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mengandung visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan dengan mengantisipasi perkembangan yang ada.

#### 4.1. Visi dan Misi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

##### 4.1.1. Visi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi atau organisasi harus dibawa, agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif. Visi merupakan kondisi masa depan yang dicita-citakan dan merupakan komitmen bersama tanpa ada paksaan. Berdasarkan musyawarah bersama dengan seluruh pegawai di jajaran Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap telah dirumuskan bahwa Visi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap adalah : ***“Terwujudnya SDM Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang Profesional dan Mandiri dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Pengembangan Agribisnis Berkelanjutan”***.

Sebagai penjelasan dari visi tersebut adalah :

- 1) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan merupakan salah satu lembaga lain yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, bertugas melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah mengelola kewenangan di bidang penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta pengembangan Sumber Daya Manusia pertanian, perikanan dan kehutanan dan ketahanan pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati dan ketentuan lain dalam rangka optimalisasi pelayanan;
- 2) ***SDM pertanian, perikanan dan kehutanan yang profesional dan mandiri dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis secara berkelanjutan*** adalah upaya

mencari, menggali, mengumpulkan, mengkaji dan merumuskan berbagai bahan kebijakan umum dibidang penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dalam rangka pemberdayaan SDM petani-nelayan serta merumuskan berbagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kewenangan/urusan wajib pemerintahan yaitu urusan ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan:

Dengan demikian, melalui visi ini diharapkan dapat terwujud masyarakat petani-nelayan yang profesional dan mandiri sehingga dapat menjadi modal dasar dalam mewujudkan SDM petani-nelayan sejahtera, dapat menghasilkan produksi yang mempunyai nilai tambah dan peluang ekspor serta dapat mewujudkan kemandirian pangan serta peduli terhadap kelestarian sumber daya alam.

#### 4.1.2. Misi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar cita-cita / tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Misi juga merupakan tujuan utama ke arah mana perencanaan / program instansi pemerintah ingin dicapai. Misi dilaksanakan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, dan diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansi Pemerintah dan mengetahui alasan keberadaannya. Misi BP2KP Kabupaten Cilacap adalah :

- 1). Meningkatkan Mutu Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan agar lebih efektif, efisien, partisipatif, terbuka, berswadaya, bermitra, komprehensif dan terpadu;
- 2). Mengembangkan kemampuan teknis, kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha di bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- 3). Meningkatkan profesionalisme SDM Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan;
- 4). Menumbuhkan pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

## 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

### 4.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dan implementasi dari pernyataan visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi yang hendak dicapai. Tujuan yang akan dicapai Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dalam jangka menengah selama 5 (lima) tahun (2012 – 2017) adalah :

1. Mendorong pemenuhan pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
2. Meningkatkan mutu dan sistem penyelenggaraan penyuluhan.
3. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya penyuluh.
4. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia petani.

### 4.2.2. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai Badan Pelaksanaan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) dalam jangka menengah selama 5 (lima) tahun dari tahun 2012 s/d 2017 adalah :

1. Meningkatnya ketersediaan dan Cadangan Pangan
2. Meningkatnya distribusi dan akses pangan
3. Meningkatnya penganekaragaman dan keamanan pangan.
4. Meningkatnya penanganan kerawanan pangan.
5. Meningkatnya mutu sistem penyelenggaraan penyuluhan.
6. Meningkatnya kemampuan dan kompetensi sumber daya penyuluh.
7. Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia petani.

## 4.3. Strategi dan Kebijakan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut di atas strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan selama 5 (lima) tahun kedepan adalah :

### 4.3.1. Strategi

Strategi yang akan dilaksanakan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan 5 (lima) tahun ke depan adalah :

- a. Pemantapan ketersediaan dan cadangan pangan.
- b. Pemantapan distribusi dan akses pangan.
- c. Peningkatan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan.

- d. Peningkatan penanganan daerah rawan pangan.
- e. Peningkatan mutu sistem penyelenggaraan penyuluhan.
- f. Peningkatan terjalinnya kemitraan
- g. Pemberdayaan sumber daya manusia penyuluh.
- h. Pemberdayaan sumber daya manusia petani.
- i. Peningkatan kemampuan kelembagaan petani.

#### 4.3.2. Kebijakan

Arah kebijakan yang akan dilaksanakan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan untuk mendukung strategi tersebut selama lima tahun ke depan adalah :

- a. Meningkatkan produktivitas dan produksi hasil pertanian.
- b. Pengembangan lumbung pangan masyarakat.
- c. Meningkatkan pemantauan harga, pasokan dan distribusi pangan.
- d. Meningkatkan diversifikasi pangan dan tanaman.
- e. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan.
- f. Meningkatkan cadangan pangan pemerintah.
- g. Meningkatkan sarana dan prasarana Balai Penyuluhan.
- h. Meningkatkan jumlah media penyuluhan.
- i. Pembentukan Pos Penyuluhan Desa.
- j. Meningkatkan terjalinnya kemitraan dengan stakeholder.
- k. Meningkatkan kemampuan dan keahlian SDM penyuluh.
- l. Meningkatkan kemampuan SDM petani.
- m. Meningkatkan pembinaan kelompok tani.

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM PRIORITAS**

Rencana program untuk tahun 2012 – 2017 kedepan penyusunan program Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap serta sesuai dengan misi ke 4 Kabupaten Cilacap yaitu “ Pengembangan perekonomian yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal dan regional melalui sinergi fungsi – fungsi pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, perdagangan, industri dan dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja” dengan 12 (dua belas) program prioritas yang akan dilaksanakan, antara lain :

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan).
2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
3. Program Pemasaran Produksi Hasil Pertanian / Perkebunan.
4. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan.
5. Program Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan.
6. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.
7. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.
8. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
9. Program Pengembangan Perikanan Budidaya.
10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
12. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Dalam mewujudkan strategis dan kebijakan tersebut di atas akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan antara lain :

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan).
  - a. Pengembangan Diversifikasi tanaman
  - b. Pengembangan Lumbung Pangan
  - c. Peningkatan mutu keamanan pangan
  - d. Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan
  - e. Analisis dan Penyusunan pola Konsumsi dan Suplay pangan
  - f. Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan

2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
  - a. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
  - b. Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
  - c. Peningkatan kemampuan lembaga petani
  - d. Evaluasi kelompok tani/nelayan
3. Program Pemasaran Produksi Hasil Pertanian / Perkebunan.  
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Produksi Hasil Pertanian.
4. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan.
  - a. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian / perkebunan
  - b. Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/ Perkebunan
5. Program Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan.
  - a. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan tepat guna
  - b. Pengadaan Sarana dan prasarana Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna
  - c. Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
  - d. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
  - e. Pelatihan Penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam
6. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.  
Pengembangan Agribisnis Peternakan
7. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.  
Pengembangan Tanaman Hutan
8. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan  
Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
9. Program Pengembangan Perikanan Budidaya.  
Pembinaan dan pengembangan perikanan
10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air, dan listrik
  - c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  - d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- g. Penyediaan Makanan dan Minuman
- h. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi
- 11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - a. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
  - b. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
  - c. Pemeliharaan rutin / berkala
- 12. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  - Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya

## **BAB VI**

### **INDIKATOR KINERJA**

Penetapan indikator kinerja Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap Barat bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Cilacap, maka indikator kinerja Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut :

1. Pemantapan ketersediaan dan cadangan pangan.
2. Pemantapan distribusi dan akses pangan.
3. Peningkatan penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan.
4. Peningkatan penanganan daerah rawan pangan.
5. Peningkatan mutu sistem penyelenggaraan penyuluhan.
6. Peningkatan terjalinnya kemitraan usaha pertanian, perikanan dan perkebunan.
7. Pemberdayaan sumber daya manusia penyuluh.
8. Pemberdayaan sumber daya manusia petani.
9. Peningkatan kemampuan kelembagaan petani.

Pencapaian indikator kinerja ditunjukkan dengan pencapaian outcome program Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada periode Rencana Strategis dapat dicapai.

Rincian selengkapnya mengenai indikator kinerja Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada lampiran.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai institusi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan tugasnya selalu berupaya untuk tetap mempertimbangkan kemampuan sumberdaya yang ada dan berorientasi terhadap pemecahan masalah dengan memperhatikan aspirasi dan dinamika yang berkembang di masyarakat.

Tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap Tahun 2012 -2017 akan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan maupun lima tahunan yang berorientasi produksi dan produktivitas pertanian, terutama dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dengan adanya Rencana Strategis Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap Tahun 2012 – 2017 diharapkan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan dalam tahun tersebut akan lebih sinergis.

Cilacap, 2014

Plt. KEPALA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN  
DAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN CILACAP  
Sekretaris

**Ir. SUSILAN**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19641104 199103 1 006

# LAMPIRAN – LAMPIRAN